

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu lebih dari 270 juta jiwa, menjadikannya negara keempat terbanyak setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India (Dwi, 2019). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya serta pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia tetap menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Salah satu permasalahan utama adalah meningkatnya angka kemiskinan, yang diperparah oleh ketimpangan dan kesenjangan sosial yang masih signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kondisi kurang sejahtera. Situasi ini menuntut peran aktif pemerintah dan berbagai pihak dalam mengurangi kesenjangan serta meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

Pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan mencerminkan peningkatan kualitas hidup, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan inti dari proses pembangunan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjelaskan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan tingkat kehidupan masyarakat (Ratnawati, O, 2022). Dengan kata lain, kesejahteraan tercapai ketika masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka guna mencapai standar hidup yang layak. Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual; seseorang dianggap sejahtera apabila kebutuhan dasarnya, baik secara fisik maupun batin, terpenuhi secara memadai (Natsir et al, 2022).

Masalah dalam bidang ekonomi memiliki dampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Sari Handayani, 2020). Kesejahteraan seringkali diukur

berdasarkan kondisi ekonomi yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Salah satu isu ekonomi yang terus menjadi sorotan dan belum terselesaikan hingga kini adalah persoalan kemiskinan. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangnya, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Beragam langkah telah diambil, namun pemerintah dituntut untuk bekerja lebih keras dan lebih strategis dalam mengatasi permasalahan ini (Rizqita, Intan, 2021) Hingga saat ini, kemiskinan tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan, salah satunya berkaitan dengan keberadaan lansia sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus (Qamariah & Mariama, 2020).

Kesejahteraan sosial bagi lansia merupakan bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup para lanjut usia, terutama mereka yang tidak lagi mampu menjalankan fungsi sosialnya (Pustikasari et al, 2021). Bentuk bantuan ini dapat berupa pelayanan, pendampingan, dan penyantunan, dengan tujuan agar lansia dapat hidup layak dan sejahtera. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, peningkatan kesejahteraan sosial lansia adalah serangkaian kegiatan terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberdayakan lansia agar tetap berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperpanjang masa produktif dan usia harapan hidup, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian, mempertahankan nilai budaya, serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program pemberdayaan ini disesuaikan dengan kondisi fisik, pengalaman, keahlian, dan kebijaksanaan para lansia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, termasuk hak atas pelayanan spiritual, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, serta kemudahan akses terhadap fasilitas umum dan bantuan sosial. (Candra et al, 2024)

Lanjut usia (lansia) merujuk pada individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan mengalami proses penuaan. Penuaan adalah proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar. Pada tahap ini, seseorang akan mulai mengalami perubahan serta penurunan dalam aspek

fisiologis, psikologis, dan sosial secara perlahan. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kesehatan lansia, yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti pola tidur, rasa nyeri, dan aktivitas yang dilakukan oleh lansia (Alba, 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai sekitar 22,6 juta jiwa, yang merupakan 11,75% dari total populasi. Angka ini diperkirakan akan meningkat signifikan pada tahun 2045, mencapai sekitar 50 juta jiwa atau 20% dari total penduduk Indonesia. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah lansia yang signifikan dalam dua dekade mendatang (komnasperempuan.go.id). Pada tahun 2020, persentase penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas) di Kota Sukabumi mencapai 9,67% dari total populasi. Angka ini meningkat dari 7,51% pada tahun 2010, menunjukkan tren menuju masyarakat menua (ageing population) . Dengan total penduduk sekitar 356.410 jiwa pada tahun 2022, diperkirakan jumlah lansia di Kota Sukabumi sekitar 34.500 orang (sukabumikota.go.id).

Pemerintah berperan dalam mengarahkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan program kesejahteraan lansia (Wilar et al, 2021). Seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia, timbul berbagai kebutuhan baru, baik jasmani, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan masalah kompleks bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program kesejahteraan sosial lansia yang terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Berdasarkan hasil observasi terhadap program-program yang dijalankan Dinas Sosial di Kota dan Kabupaten Sukabumi, ditemukan bahwa kedua wilayah tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) melalui berbagai inisiatif, seperti program "Tanda Cinta untuk Lansia", "Gebrak Sosial", dan penetapan Kota Sukabumi sebagai "Kota Santun Lanjut Usia", yang mencakup layanan kesehatan, bantuan sosial, serta pembentukan rumah singgah. Di Kabupaten Sukabumi, perhatian terhadap lansia tercermin dalam program "Sukabumi Nyaah Ka Indung", peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, serta bimbingan

sosial bagi lansia terlantar, yang semuanya mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini juga diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan langsung dari Menteri Sosial yang menyerahkan bantuan kepada lansia dan penyandang disabilitas, menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah dalam menangani isu-isu sosial lansia secara terpadu dan berkelanjutan.

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah yang berperan signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat. Salah satu tugas utamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh, di Kota Sukabumi terdapat program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam menggali dan mengembangkan potensi individu yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Syaefullah et al., 2022)

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Ningtiana dkk. (2021) yang mengkaji tentang "Strategi Dinas Sosial Kota Batu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) Terlantar (Studi Kasus Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu)". Penelitian tersebut mendeskripsikan strategi, implementasi, dan efektivitas upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar di Kelurahan Sisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama Dinas Sosial adalah dengan mengusulkan lansia terlantar untuk menerima program bantuan insentif lansia sebesar Rp500.000 per bulan. Program ini telah diimplementasikan dengan baik dan dinilai tepat sasaran. Strategi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, karena secara langsung mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlantar di Kelurahan Sisir.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Aprianti dkk. (2025) yang mengkaji tentang "Kapasitas Dinas Sosial Kota Cirebon Dalam Pelayanan Lansia Terlantar Di Luar Panti Sosial". Penelitian tersebut membahas Dinas Sosial Kota Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar melalui pelayanan di luar panti sosial, dengan fokus pada kapasitas organisasi sebagai faktor penentu efektivitas pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Dinas Sosial masih terbatas, terutama dalam aspek sumber daya manusia yang kurang jumlah dan keterampilannya, keterbatasan anggaran yang hanya bersumber dari APBD, serta infrastruktur dan proses pelayanan yang belum optimal. Kapasitas perencanaan dan pengembangan juga masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, kapasitas hubungan dan jaringan dinilai cukup baik dan mampu membantu mengatasi sebagian kendala tersebut.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Qamariah dkk. (2020) yang mengkaji tentang "Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial oleh Dinas Sosial telah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh lansia terlantar. Strategi utama yang dilakukan adalah penyaluran bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok lansia terlantar, sebagai upaya memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka. Keberhasilan strategi ini didukung oleh kerja sama antar instansi, dukungan masyarakat, serta komitmen aparat pelaksana.

Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian terdahulu yang belum banyak mengkaji strategi Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Kota Sukabumi. Penelitian ini berfokus pada strategi Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar melalui program pelayanan sosial, dengan objek penelitian di Kota Sukabumi sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "*Strategi Dinas Sosial Kota Sukabumi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Melalui Program Pelayanan Sosial.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar?

2. Bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan strategi dalam program rehabilitasi sosial lansia terlantar yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi?
3. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan strategi tersebut dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan lansia terlantar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar.
2. Untuk mengkaji proses perumusan dan implementasi strategi dalam program rehabilitasi sosial lansia terlantar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi terhadap pelaksanaan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Untuk mendapatkan bukti-bukti data nyata mengenai Strategi Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam memajukan kesejahteraan orang tua melalui program layanan sosial yang akan berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan akademis siswa.

2. Manfaat Manajerial

Studi ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi serta sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian, yaitu pendekatan Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan orang tua melalui program pelayanan sosial.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran